

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Gerakan golput pada 2019 didorong oleh sekelompok aktivis pro-demokrasi yang berjejaring dan berbagi keprihatinan yang sama. Kekhawatiran ini muncul dari situasi nyata kerja advokasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Ada sektor agraria dan tata ruang, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hukum dan antikorupsi, tenaga kerja, hingga kelompok rentan dan minoritas seperti suara dari kelompok yang terpinggirkan oleh agenda pembangunan negara.

SayaGolput adalah representasi dari masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam politik dengan cara melawan arus. Partisipasi politik dari gerakan SayaGolput terlihat dari sikap mereka yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilu sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap pemerintah, SayaGolput juga mengkritik berbagai kebijakan Pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Beragam Ekspresi protes dari gerakan ini terlihat dari protes yang mereka lakukan baik di media sosial dengan menggunakan platform medium dan twitter dan beragam aksi nyata dari mulai demonstrasi, diskusi, hingga deklarasi golput.

SayaGolput adalah gerakan yang hadir bukan karena ketidakpedulian terhadap negara, dan bukan bertujuan untuk mengacaukan pemilu lima tahunan, gerakan ini juga bukan hanya untuk membuat kontroversi sesaat atau hanya mencari sensasi saja. Gerakan ini hadir akibat adanya ketidakpercayaan politik terhadap para penyelenggara negara dengan berkaca dari kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak pro rakyat..

#### **4.2.Saran**

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan serta rekomendasi bagi objek yang ada dalam penelitian ini, yaitu gerakan SayaGolput. Saran dari penulis untuk gerakan ini, meskipun bisa dikatakan gerakan ini memiliki efek yang cukup luar biasa dalam menggerakkan massa, namun akan lebih baik jika kedepannya gerakan ini bisa memiliki struktur yang jelas sehingga akan memudahkan pendistribusian tugas dan fungsi untuk setiap orang yang berperan aktif dalam gerakan ini. Selain itu persiapan dan perencanaan dari gerakan ini harus dilakukan lebih matang karena kelompok ini merupakan kelompok yang dianggap melawan sistem politik sehingga harus siap untuk mempertahankan gerakan ini dari berbagai hambatan. Penulis juga menyarankan agar gerakan ini harus tetap pada jalurnya yaitu menjadi oposisi yang independen agar tidak mudah ditunggangi oleh aktor politik dan bisa tetap menjadi pengawas pemerintahan yang berjalan, dan gerakan ini harus tetap menjaga eksistensinya walaupun pemilu sudah selesai .

Saran dari penulis untuk pemerintah dan elit politik, seharusnya Pemerintah bisa mendengarkan tuntutan para aktivis pro-demokrasi yang meminta keadilan Pemerintah. Pemerintah harus bisa menghilangkan ketidakadilan dalam sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus siap untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat. Pemerintah harus bisa mewujudkan Indonesia yang adil dengan menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, hukum, maraknya korupsi, oligarki hingga permasalahan HAM berat yang tidak kunjung tuntas di Indonesia. Presiden

memiliki kewewenangan tertinggi dalam negara seharusnya dapat mengembalikan kedaulatan ke tangan Rakyat sesuai amanat UUD 1945. Pemerintah seharusnya mau merubah citranya menjadi lembaga negara yang adil, bersih dan tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau represi terhadap kritik rakyat.